

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D., dkk. (2021). Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 60-67.
- Amane, A. P. O., dkk. (2023). *Reformasi Administrasi Publik*. Anggota IKAPI Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Anisah, S. W. D. (2021). *Improving the Quality of Public Services at The Department of Community Empowerment and Villages of East Java Province*. *Jurnal Intelektual UBHARA*.
- Behn, R. D. (2001). *Rethinking Accountability in Public Administration*. *Public Administration Review*, 61(2), 159-167.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The New Public Service*. New York: M.E. Sharpe.
- Dhiraj, A. (2015). *Reliability Testing using Cronbach's Alpha in SPSS*. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, Volume 6, Issue 4.
- Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*. UGM Press.
- Febria, A., Taufik, T., & Safitri, D. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dimoderasi Pengawasan Internal. *Jurnal Politeknik Caltex Riau*, 14(1), 37-44.
- Hermansyah, I., dkk. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi UNSIL*.
- Kushartiningsih, R., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJ-IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2022.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2003). *Pedoman Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN.

- Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsyar, A., Musakkir, S. M. K., Sudarmi., Ma'ruf, A., & Rijal. (2022). *Responsiveness of the Indonesian Ombudsman in Handling Complaints about Maladministration of Police Services of the Republic of Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*. 12(2), 311-324.
- Mulgan, R. (2000). *Accountability: An Ever-Expanding Concept?. Public Administration*, 78(3), 555-573.
- Mursyidah, L., & Choiriyah, I. U. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Nasution, M. N. (2013). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik/Hayat*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Nurdin, I. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik)*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Oladimeji, K. A. (2024). *Exploring the Role of Ethics and Accountability in Enhancing Organizational Performance: The Moderating Influence of Perceived Organizational Support in the Public Sector. Journal of Governance*, 9(2), 189-200.
- Pradana, M. (2024). *Teori Organisasi di Era Digital*. Jawa Tengah, Eureka Media Aksara.
- Prameswari, F. A., Rachma Sari, K., & Sarikadarwati. (2024). *Determinasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang. Jurnal Riset Terapan Akuntansi*. 8(2), 357–371.
- Priyanto, Dwi. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putri, F. D., Defitri, S. Y., & Sukraini, J. (2022). *Determinasi Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik. Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(11), 1-10.
- Rahmadana, M. F., dkk. (2020). *Pelayanan Publik*. Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Ratnasari, D., Sastrodiharjo, I., & Rely, G. (2024). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Organisasi, dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Nilai Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian. Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 2(3), 1-10.

- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). *Management* (11th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Santoso, T. I., dkk. (2024). Kabupaten Rembang dalam Angka 2024. Rembang: BPS Kabupaten Rembang.
- Sari, H., dkk. (2020). Akuntabilitas Kinerja Pegawai dalam Pelayanan kepada Masyarakat di Unit Pelayanan Teknis (UPT) DISDUKCAPIL Banjarmasin Timur. *Jurnal UNISKA*.
- Saribu, A. D. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. *Media Studi Ekonomi*, 20(1), 91-108.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jawa Tengah: Deepublish Publisher.
- Setiad, A., Kiyai, B., & Ruru, J. M. (2013). Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-16.
- Setioko, S., dkk. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Suci, R. C. E., & Rohman, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value for Money pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. *Diponegoro Journal of Accounting*. 12(4), 1-15.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Penerbit ALFABETA.
- Syaputri, A., & Amri, K. (2023). Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*.
- Yuniningsih, T., dkk. (2017). *Bunga Rampai Etika Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Press FISIP-UNDIP.
- Yuniningsih, T., & Suwitri, S. (2019). Pelayanan Publik di Era Otonomi Desa Antara Harapan dan Kenyataan (Sebuah Tinjauan Kritis). *Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG)*.
- Yusriandi, R., & Marefanda, N. (2023). Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik FISIP UM Mataram*.

Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.

Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.